

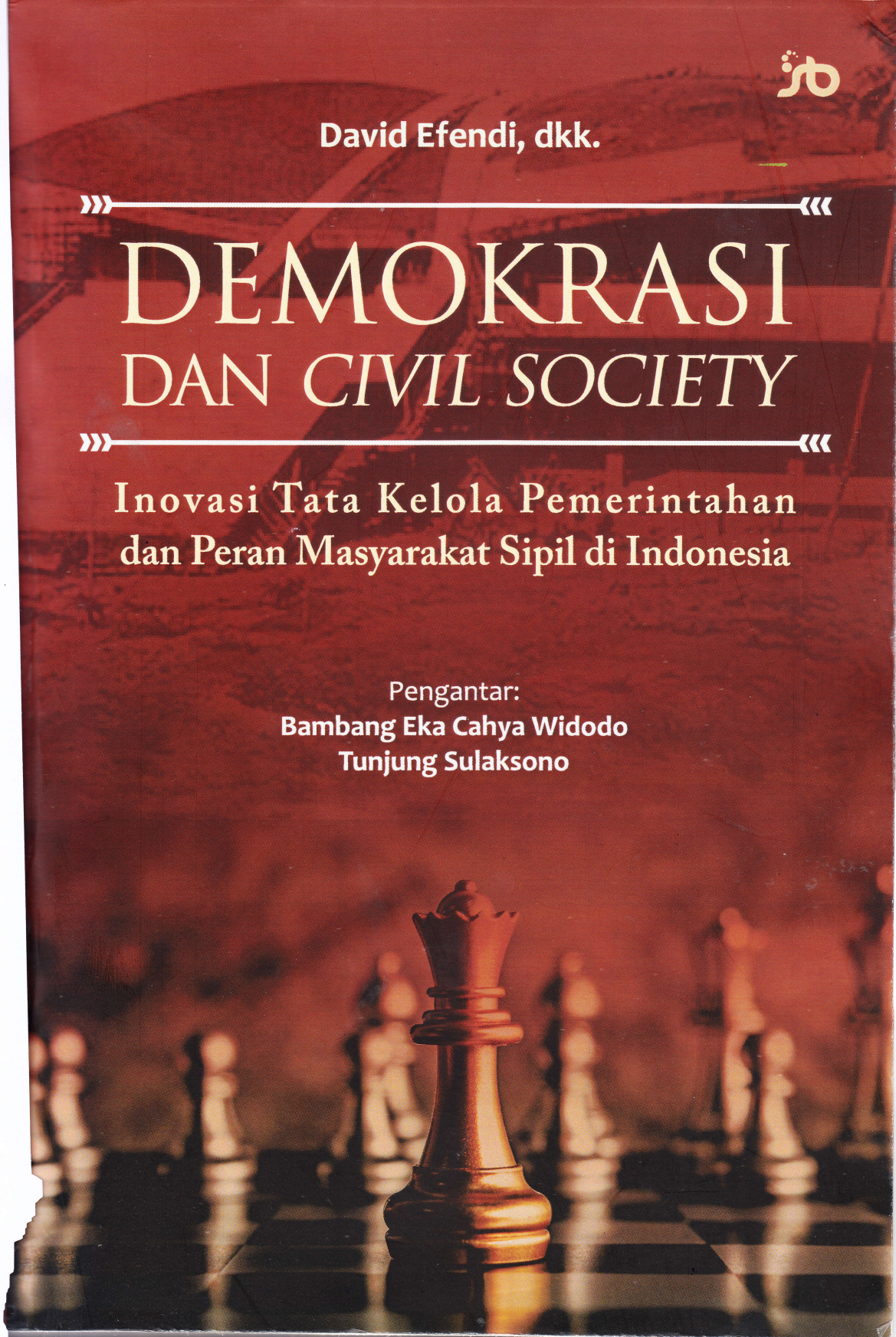


David Efendi, dkk.

»»—————««
DEMOKRASI
DAN *CIVIL SOCIETY*
««—————»»

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia**

Pengantar:
Bambang Eka Cahya Widodo
Tunjung Sulaksono



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|------|
| PRAKATA EDITOR | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xv |
| DAFTAR ISTILAH | xix |
| DAFTAR ISI | xxi |

BAB 1 GOVERNANCE, KRISIS, DAN INOVASI DI MASA PANDEMI COVID-19

| | |
|---|-----|
| Re-Design Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia <i>M. Daimul Abror</i> | 2 |
| Inovasi Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Amarta” dan “Tirta Mandiri” dalam Menjaga Eksistensi di Masa Pasca Pandemi Covid-19 <i>Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat & M. Lutfie Khoiri</i> | 22 |
| Penguatan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata-Bencana Menuju Next Normal di Kawasan “Kedungsepur” <i>Muchamad Zaenuri & Ganapati Sjastri Satyani</i> | 46 |
| Manajemen Krisis Pemerintah dalam Menangani Covid-19 di Indonesia <i>Rahmawati Husein, Tetryana Rendi Ziar Zhafira & Tiara Khariunnisa ...</i> | 87 |
| Kolaborasi Pentahelix sebagai Sarana Penguatan UMKM di Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19 di Yogyakarta <i>Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani & Vindhi Putri Pratiwi</i> | 121 |
| Kolaborasi Model Pentahelix dalam Penanganan Bencana <i>Suswanta</i> | 140 |

| | |
|--|---|
| Menguji Relevansi Konsep <i>Governance</i> Melalui Praktik Penanganan Covid-19 di Indonesia | |
| <i>Aprilianto Satria Pratama</i> | 1 |
| Urgensi Pengesahan Permendikbud No. 30 di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Respon Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual di Indonesia | |
| <i>Eli Kardilla & Melania Novitasari</i> | 1 |
| Belajar dari Pandemi Covid-19: Komunikasi Krisis sebagai Alternatif Perspektif Komunikasi Pemerintahan di Masa Krisis | |
| <i>Dian Eka Rahmawati & Misran</i> | 2 |
| BAB 2 POLITIK ELEKTORAL DI MASA PANDEMI COVID-19 | |
| Respon Netizen Terhadap Desa Anti Politik Uang dan Identifikasi Desa Anti Politik Uang | |
| <i>Bambang Eka Cahya Widodo & Moch Edward Trias Pahlevi</i> | 2 |
| Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah Pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 | |
| <i>Ridho Al-Hamdi & Sakir</i> | 2 |
| BAB 3 DEMOKRASI DAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19 | |
| Refleksi Demokrasi: Represifitas dan Fenomena <i>Spiral Of Silence</i> | |
| <i>Titin Purwaningsih & Azka Abdi Amrurrobi</i> | 2 |
| Pendayagunaan Indeks Demokrasi Indonesia di Era Pandemi: Pelajaran dari Empat Kabupaten/Kota | |
| <i>David Efendi, Husni Amriyanto Putra & Fauzan Sandiah</i> | 2 |
| E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Melalui Analisis Media Daring | |
| <i>Bachtiar Dwi Kurniawan & Moch Edward Trias Pahlevi</i> | 2 |



| | |
|--|-----|
| Perempuan di Masa Pandemi Covid-19: Ketimpangan Gender di Dalam Keluarga pada Tatanan Hidup Baru | |
| <i>Fajar Apriani</i> | 353 |
| Lokalisasi Demokrasi: Peran Identitas Budaya Dalam Gerakan Politik Keistimewaan Di Di Yogyakarta | |
| <i>David Efendi, Prawira Yudha Pratama & Bubu Alim Swarga</i> | 371 |
| BAB 4 CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRATISASI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19 | |
| Pengelolaan Website Corona Jogjaprovo.go.id sebagai Media Sosialisasi Masyarakat dalam Mencegah Pandemi Covid-19 | |
| <i>Razha Nur Oktavianti & Yeni Rosilawati</i> | 406 |
| Deliberative Policy: Urgensi Konsistensi Data Covid-19 di Indonesia | |
| <i>Tri Sulistyarningsih & Umi Kulsum</i> | 435 |
| Evaluasi Program Smart Environment di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Program Penjemputan Limbah Elektronik E-Waste di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta) | |
| <i>Ummi Zakiyah & Danty Yuansah</i> | 454 |
| Daya Tahan Masyarakat Sipil Berbasis Komunitas dalam Gerakan Pertanian Kota di Yogyakarta | |
| <i>Lantip Fajar Utomo & David Efendi</i> | 477 |
| Respon Civil Society Terhadap Aplikasi PeduliLindungi Melalui Hastag Twitter #Pedulilindungi | |
| <i>Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra & Dian Eka Rahmawati</i> | 488 |
| Engagement Publik dalam Opini Media Sosial: Kebijakan PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru 2022 | |
| <i>Mohamad Sukarno & Utami Nur</i> | 507 |
| Menutup Peluang Korupsi di Tengah Pandemi | |
| <i>Tanjung Sulaksono</i> | 526 |

| | |
|---------------|-----|
| INDEKS | 553 |
| BIOGRAFI..... | 559 |



PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID-19: KETIMPANGAN GENDER DI DALAM KELUARGA PADA TATANAN HIDUP BARU

Fajar Apriani
Dosen Administrasi Publik
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Peran perempuan di dalam keluarga seringkali dikonstruksi dan ditempatkan secara subordinat di dalam masyarakat yang patriarki. Perempuan selalu diertakan dengan kerja-kerja rumah tangga dan tugas reproduktif terkait tanggungjawabnya pada suami dan anak-anak pada ranah domestik. Tulisan ini menganalisis relasi gender yang timpang di dalam keluarga selama pandemi Covid-19 melanda kehidupan, dimana perempuan mengalami dampak yang lebih berat daripada laki-laki bahkan lebih berlipat dibandingkan masa sebelum pandemi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui perspektif kebijakan dengan menggunakan teknik studi literatur yang berorientasi pada pengumpulan informasi sekunder dari bermacam sumber yang memiliki keterkaitan dengan materi penelitian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberi dampak yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memperoleh dampak buruk yang lebih besar daripada laki-laki dalam hal menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dalam kehidupannya selama pandemi Covid-19. Walaupun pemerintah telah menyalurkan beragam bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat di masa pandemi, namun ragam bantuan

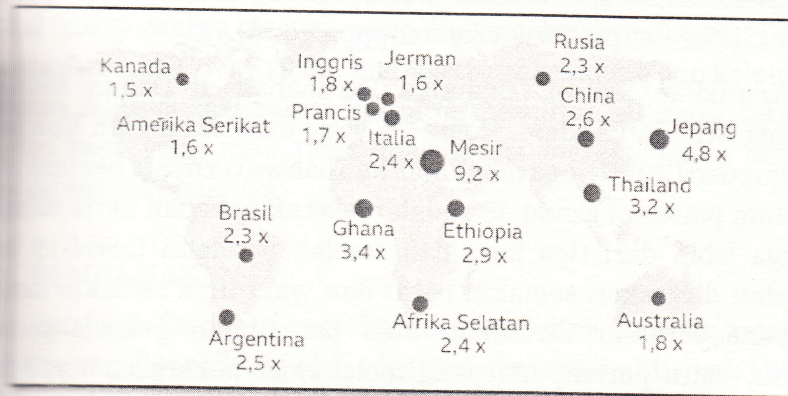
sosial tersebut belum menjangkau perempuan yang merupakan kelompok paling rentan. Selain masih perlunya pemerintah membenahi implementasi kebijakan jaring pengaman sosial yang masih kacau balau pada level pusat maupun daerah, pemerintah juga perlu menangani dampak pandemi Covid-19 bagi perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis pemenuhan kebutuhan perempuan dan berkeadilan gender secara lebih baik. Upaya-upaya ini tentu membutuhkan sinergitas yang lebih masif dan melibatkan lebih banyak pihak dalam kolaborasi, mendabuhakan rasa kepedulian, tenggang rasa dan tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan sosial yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Perempuan, Relasi Gender, Ketimpangan Gender, Kelompok Rentan, Kesejahteraan Sosial, Pandemi Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menjadi momok bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya menjadi krisis dalam bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan berbagai dampak dalam bidang kehidupan lainnya. Namun perempuan menjadi kelompok yang paling rentan atas dampak pandemi Covid-19. Data global tahun 2020 berdasarkan penelitian *United Nations Women* menyatakan bahwa kaum perempuan kini lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus keluarga akibat dampak Covid-19 (www.bbc.com/indonesia). Adapun waktu yang dihabiskan perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah maupun di negara-negara industri yang lebih tinggi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tanpa bayaran pada sebelum pandemi Covid-19 telah berkali lipat dibandingkan dengan laki-laki sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Perbandingan Waktu yang Dhabiskan Perempuan Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Dibandingkan Laki-laki Sebelum Pandemi Covid-19.



Sumber: *United Nations* dalam BBC Indonesia, 2020.

Maka di masa pandemi Covid-19, kelipatan perbandingan waktu tersebut kemudian semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak? Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai *social distancing* dan *physical distancing* menjadikan perempuan terperangkap di dalam kerja-kerja rumah tangga yang lebih banyak dibandingkan masa sebelumnya, terutama bagi pekerja perempuan. Perubahan tempat kerja ke rumah dan pelarangan sekolah tatap muka membawa dampak semakin meningkatnya beban pekerjaan rumah tangga bagi perempuan. Ditambah lagi dengan peran dan tanggungjawabnya dalam pemenuhan kewajiban untuk menyediakan asupan sehat, penjaminan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penerapan protokol kesehatan, pengasuhan dan perawatan bagi seluruh anggota keluarga yang bergejala bahkan yang terjangkit Covid-19 dengan terbatasnya layanan kesehatan yang tersedia.

Untuk kasus Indonesia, melalui kerjasama *United Nations Women* dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indosat Ooredoo dalam Survei "Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" diketahui bahwa pandemi Covid-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan

ketidaksetaraan gender di Indonesia. Hal ini disebut berpotensi mengancam kemajuan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* (<https://www.kemempna.go.id>).

Kemudian Survei Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Komisi Perempuan (2020) juga menunjukkan bahwa ternyata perempuan sebelum pandemi Covid-19 sudah melakukan beban kerja rumah tangga lebih dari tiga jam, dan setelah pandemi Covid-19 hal tersebut dirasakan semakin berat dan waktunya semakin lama. Proporsi terbesar dirasakan oleh perempuan pekerja penuh waktu, yaitu perempuan yang melakukan pekerjaan berbantuan. Sehingga kesimpulan survei adalah pandemi Covid-19 menambah beban fisik maupun mental bagi perempuan pekerja penuh waktu.

Selain itu, data BPS (2020) menunjukkan bahwa dalam perubahan perekonomian dari triwulan IV 2019 ke triwulan I 2020, penurunan lapangan kerja terjadi pada sektor pendidikan sebesar -10,39 persen dan di sektor administrasi pemerintahan sebesar -8,54 persen, dimana pekerja pada kedua sektor tersebut mayoritas adalah perempuan. Sektor pendidikan mempekerjakan pekerja perempuan sebesar 7,95 persen dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 2,84 persen. Sedangkan untuk pekerja laki-laki jumlahnya tidak sampai mencapai 4 persen pada kedua sektor tersebut (BPS, 2019). Beberapa *evidence* tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak buruk yang lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki dalam hal menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dalam kehidupannya.

Walaupun sepanjang pandemi Pemerintah telah memberikan perhatian besar tentang masalah kesehatan dan ekonomi untuk membantu masyarakat, namun kebutuhan spesifik perempuan masih membutuhkan pemenuhan yang lebih baik dari pemerintah. Sejumlah dampak pandemi Covid-19 yang dialami perempuan merebak hingga pada isu kekerasan yang terutang terjadi di ranah domestik, perceraian hingga perkawinan. Melalui kebijakan, pemerintah memiliki kesempatan untuk berupaya memenuhi tanggungjawabnya dalam melindungi dan

menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Termasuk dalam hal pemenuhan hak dasar dan memperbaiki taraf hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Dalam kasus pandemi Covid-19 ini, membantu perempuan dan kelompok rentan lainnya mengatasi kesulitan-kesulitan di masa tatanan hidup baru yang mau tidak mau harus mereka jalani dengan segala konsekuensinya.

3. PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 memberikan beragam dampak maupun bobot yang dipengaruhi oleh identitas seseorang. Misiyah (2021) menyatakan semakin marginal identitas seseorang, maka beban yang akan ditanggungnya juga akan semakin berat, termasuk akses terhadap Jaring Pengaman Sosial juga akan semakin jauh.

Dampak pertama yang mempengaruhi kehidupan perempuan selama masa pandemi Covid-19 adalah meningkatnya beban kerja rumah tangga yang lebih banyak dan lebih berat daripada masa sebelum pandemi. Kondisi ini tepatnya disebut dengan *multiple burden*, tidak lagi disebut sebagai *double burden* sebagaimana Faqih (1995) menyebutnya sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh konsep gender di masyarakat patriarki. Beban perempuan menjadi menjalankan banyak peran sebagai *superwoman* yang dalam satu kondisi dituntut untuk mampu menangani banyak hal: bekerja dari rumah (akibat penerapan sistem *work from home*), melakukan kerja-kerja rumah tangga rutin, mengasuh anak, mendampingi anak belajar (akibat sistem pembelajaran daring), tumpuan penyediaan pangan keluarga, bertanggungjawab penerapan PHBS dan protokol kesehatan di lingkungan keluarga, dan sebagainya. Belum lagi ditambah bila suaminya seorang pekerja harian, yang memegang peran sebagai pencari nafkah utama tidak bisa keluar rumah akibat kebijakan karantina, maka perempuan akan turut memikirkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Hal ini menjadi ironi ketika rumah dikenal sebagai "istana bagi perempuan", namun perempuan pulalah yang mendapat beban terberat di rumahnya

karena posisi perempuan dalam pengelolaan keluarga sangat penting, terlebih di masa pandemi.

Multiple burden terberat salah satunya dialami perempuan karena pemenuhan kewajibannya atas tanggungjawab domestik di ruang privat dan sekaligus tanggungjawab atas pekerjaan berbayarnya di ruang publik. Hal ini terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, sehingga pada masa pandemi hal ini pun semakin menjadi-jadi. Ramesh dan Anand (2000) menyatakan kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan perempuan harus menjalani peran ekonomi dan domestik sekaligus. Komnas Perempuan (2008) bahkan dalam Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menemukan bahwa berbagai cara dilakukan perempuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga, mulai dari menjadi gundik, berutang, hingga menjadi buruh migran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi rumah tangga (keluarga).

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, secara global sekitar 51 persen perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 82 persen. Perempuan rumah tangga yang seringkali menjadi tugas perempuan, salah satu hal yang mempengaruhi ketersediaan kesempatan untuk bekerja. Rata-rata gaji yang diterima perempuan 20 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki (ILO, 2015). Perempuan tersebut dilaporkan tidak mengalami banyak perubahan dalam 20 tahun terakhir. Dalam bidang ketenagakerjaan, perempuan memiliki kecenderungan lebih besar dikategorikan sebagai buruh angkatan kerja. UNFPA (2014) menyatakan perempuan biasanya menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh rumah tangga sendiri seperti menyiapkan dan menyajikan makanan, merawat anak, orang sakit, atau orangtua yang terdapat di dalam rumah tangga.

Untuk kasus Indonesia, berdasarkan Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perempuan pedesaan yang bekerja jumlahnya lebih banyak (52,2%)

persen) daripada perempuan perkotaan (47,02 persen). Namun perempuan perkotaan yang mengurus rumah tangga jumlahnya lebih banyak (37,45 persen) daripada perempuan perdesaan yang mengurus rumah tangga (35,67 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di perdesaan lebih banyak yang bekerja untuk kesejahteraan keluarganya bahkan dapat menjadi pencari nafkah utama sebagaimana laki-laki, ketimbang perempuan di perkotaan. UNFPA (2014) menyatakan bahwa partisipasi perempuan yang bekerja meningkatkan peran perempuan terhadap perolehan pendapatan rumah tangga dan kontrol mereka terhadap alokasi sumberdaya. Walau pada umumnya, tingkat pengangguran perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan pengangguran laki-laki.

Kemudian pada umumnya, perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam jenis pekerjaan informal, yang diantaranya bekerja sebagai pekerja atau asisten rumah tangga atau pekerja rumahangan. Mengapa demikian? Disamping perempuan cenderung menempati bidang-bidang pekerjaan yang "sesuai porsinya" sebagai perempuan atas dasar alasan kultural maupun sosial-ekonomi pada ranah domestik dan memilih pekerjaan atas dasar pertimbangan psikologis (Tjiptoherijanto, 2012), akses seseorang terhadap pekerjaan diantaranya juga dapat dipengaruhi adanya sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal, status perkawinan, sektor hingga status pekerjaan utamanya.

Deskripsi tingkat pendidikan perempuan perkotaan tentu saja lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan perempuan perdesaan. Kemudian dari jenis kelamin, tentu saja pekerja laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan, di perkotaan maupun di perdesaan. Dari status perkawinan, penduduk dengan status menikah menjadi mayoritas pekerja baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun pekerja yang berjenis kelamin laki-laki tetap lebih mendominasi daripada pekerja yang berjenis kelamin perempuan dalam hal tersebut. Terkecuali untuk pekerja yang berstatus cerai hidup ataupun cerai mati, pekerja

perempuanlah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki.

Sedangkan deskripsi mengenai lapangan pekerjaan bagi pekerja perempuan diketahui penyebarannya paling banyak (26,62 persen) terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan jauh lebih tinggi bagi pekerja perempuan yang tinggal di perdesaan daripada di perkotaan. Pada sektor industri pengolahan dan perdagangan juga jumlah pekerja perempuan lebih banyak daripada jumlah pekerja laki-laki. Kemudian menurut status pekerjaan utamanya, pola yang terbentuk untuk pekerja laki-laki maupun perempuan sama saja, bahwa pekerjaan sebagai buruh, pegawai dan karyawan merupakan status pekerjaan utama yang paling dominan. Namun persentase untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada pekerja perempuan.

Ditemukan pula bahwa pada tahun 2013 terdapat tiga juta rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang dikepalai perempuan yang berada di tiga desa terpencil terendah dalam Basis Data Terpadu (BDT) Padahal, rumah tangga perempuan mencakup 14 persen dari semua rumah tangga berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia. Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA dalam Zulminarni, 2012) meyakini bahwa data kepala keluarga perempuan merupakan fenomena gunung es, dimana angka realitasnya di lapangan sesungguhnya lebih tinggi dari angka yang terdata.

Rumah tangga perempuan memiliki profil status perkawinan yang berbeda. Sebagian besar rumah tangga perempuan yang berada di desa terpencil terendah adalah janda yang ditinggalkan (75 persen), bercerai (14 persen), menikah (10 persen) dan belum menikah (dua persen). Sebaliknya, hampir semua laki-laki kepala rumah tangga memiliki status perkawinan menikah yang sebesar 96 persen (Lockley dkk, 2013).

Terlepas dari kondisi ekonominya yang miskin, keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga dalam realita kehidupan mampu menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi kepala

lingkan keluarga untuk memelihara kesejahteraan keluarga. Perempuan kepala rumah tangga dikatakan oleh Sigiro (2012) adalah sebuah gambaran yang unik dari keberdayaan perempuan dari kemiskinan keluarga.

Penelitian kerjasama *United Nations Women* dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indosat Ooredoo dalam Survei "Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" menemukan bahwa: 1) Banyak perempuan di Indonesia bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82 persen diantaranya mengalami penurunan sumber pendapatan. Meskipun 80 persen laki-laki juga mengalami penurunan pendapatan, laki-laki mendapat keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatannya. 2) Sejak pandemi sebanyak 36 persen perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30 persen mengalaminya. 3) Pembatasan sosial telah membuat 69 persen perempuan dan 61 persen laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan perempuan memikul beban lebih berat, mengingat sebanyak 61 persen perempuan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 48 persen. 4) Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan. Hal ini disebabkan karena 57 persen perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender. Sedangkan jumlah laki-laki yang mengalami permasalahan tersebut hanya 48 persen (<https://www.kemenpppa.go.id>).

Maka kondisi-kondisi tersebut mengungkap bahwa posisi perempuan Indonesia di dalam perannya terkait kesejahteraan keluarga sungguh tertinggal untuk dapat menjadi bagian dari pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan. Manakala pandemi Covid-19 datang melanda, maka kondisi ini semakin buruk menimpa perempuan.

Data UN Women (2020) tentang Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa pandemi menyebabkan meningkatnya pekerjaan rumah tangga, kerja perawat, dan pengasuhan tak berbayar dengan intensitas peningkatan perempuan sebesar 19 persen, sementara laki-laki 11 persen. Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian Komnas Perempuan (2020) selama April hingga Mei 2020 mengenai dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama Covid-19 di 34 provinsi di Indonesia. Diantaranya bahwa mayoritas responden mengaku mengurus rumah tangga (perempuan sebesar 89 persen dan laki-laki sebesar 83,4 persen) sementara 96 persen responden merasakan beban pekerjaan rumah tangga yang semakin banyak. Perempuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dua kali lipat dengan durasi waktu lebih dari tiga jam sehari.

Ramesh dan Asher (2000) menyatakan bahwa meski Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan di bidang sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, namun cakupannya sangat terbatas kepada pegawai negeri, militer, polisi serta pekerja formal saja. Terkait hal itu, Midgley (dalam Sigi, 2012) menyatakan bahwa memang kebijakan sosial di negara berkembang umumnya bersifat terbatas dan residual. Terbatas dalam arti kebijakan sosial yang ada jumlahnya tidak memadai (inkremental), sedangkan residual artinya bantuan sosial ditujukan terutama bagi kelompok masyarakat termiskin.

Sepanjang pandemi, aspek yang dianggap paling penting untuk diselesaikan adalah penanganan masalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Isu gender dianggap bukan bagian dari masalah pandemi sehingga tidak masuk dalam prioritas penanganan pandemi (Misiyah, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyalurkan ragam bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Ragam bantuan sosial tersebut mencakup bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bantuan sosial non

reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk wilayah Jabodetabek.

PKH merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang sosial yang responsif gender. PKH adalah suatu program bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima bantuan sosial melalui PKH adalah ibu-ibu atau perempuan pengurus rumah tangga. PKH sekilas nampak menempatkan perempuan dalam posisi penting bagi pencapaian kesejahteraan keluarga, tetapi Sigiuro (2012) melacak lebih jauh bahwa syarat-syarat dari pemberian bantuan sosial PKH jika tidak hati-hati sesungguhnya justru dapat lebih banyak membebani perempuan. Sejumlah syarat itu diantaranya keluarga membawa anggota keluarganya (ibu hamil dan/atau balita) secara teratur ke fasilitas kesehatan, menyekolahkan anak di dalam keluarga yang berusia sekolah serta memastikan kehadiran anak tersebut di sekolah. Namun demikian, perempuan sebagai target utama dari PKH tidak diperhitungkan beban ganda yang dialaminya. Sebab ibu atau perempuan penerima bantuan dari PKH belum tentu yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bantuan yang diberikan bagi tiap RTSM hanya bersifat tambahan karena diasumsikan keluarga tersebut memiliki sumber nafkah lain, bukan penggantian upah bagi kerja domestik sepenuhnya seperti yang diimplementasikan pada negara-negara Eropa. Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Sosial (2011) bahwa bantuan sosial (di Indonesia) yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan yang bersifat sementara atau tidak bersifat terus-menerus.

Penerima PKH terdiri dua komponen yang ada di dalam keluarga: *pertama*, komponen keluarga yaitu ibu hamil, anak usia dini, keluarga, lansia dan disabilitas, *kedua* komponen pendidikan keluarga PKH bagi anak usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Implementasi PKH di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan bila dilihat dari besaran bantuan yang diberikan kepada sasaran penerima. Jika sebelumnya maksimum

Rp.2.200.000,- per tahun bagi tiap RTSM, tercatat untuk tahun 2021 dapat mencapai maksimal hingga Rp.3.000.000,- per tahun bagi tiap RTSM. Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Sosial membatasi bantuan PKH hanya bagi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Selama pandemi pula, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020) penyaluran PKH mengalami peningkatan sebanyak 25 persen selama satu tahun terakhir, dimana sebelumnya terdapat 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi bertambah mencapai 10 juta KPM dari total anggaran sebesar Rp.37,4 Trilyun.

Pencapaian untuk program-program bantuan sosial lainnya tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020) bahwa untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai 9 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mencapai 11 juta KPM dan Bantuan Sosial Sembako (BSS) mencapai 1,3 juta KPM untuk wilayah DKI Jakarta dan 600.000 KPM untuk wilayah Bodetabek. Sejumlah penelitian menemukan bahwa bantuan-bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19 hingga kini masih belum terimplementasikan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan (Santoso dkk, 2019; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020), ketidakefektifan pemerataan penyaluran bantuan, waktu pendistribusian yang relatif lama, penyelewengan dana, pungutan liar maupun pengurangan besaran bantuan dan sumberdaya yang diterima, politisasi bantuan sosial (Noerkaisar, 2021), lemahnya evaluasi dan *monitoring* (Negara dan Nuswardani, 2014), penyalahgunaan oleh Pemerintah Daerah (Purnia dkk, 2019) maupun Pemerintah Pusat (Noerkaisar, 2021) kesimpangsiuran informasi mengenai akses penerimaan bantuan sosial di masyarakat bahkan tumpang tindih program bantuan sosial (Mufitah, 2020). Hasil riset Saiful Mujani *Research & Consulting* (SMRC) yang dilakukan pada pertengahan tahun 2020 justru menghimpun kesemua kendala tersebut terkait implementasi

program-program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Program-program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) seringkali di dalam implementasinya menimbulkan permasalahan lainnya. Masalah pendistribusian bantuan sosial yang belum optimal, berkaitan dengan sistem penunjang ketetapan yang masih samar dan belum ditunjang oleh kesiapan yang baik dari para pelaksana di lapangan. Masalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, sangat terkait dengan pendataan masyarakat. Mulai dari data yang tidak ter-update secara rutin hingga pendataan yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan pihak yang memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah dimana moralitas tergerus oleh keinginan mendapat suplai kebutuhan hidup secara instan di masa-masa sulit Covid-19. Pemalsuan data terjadi di tangan pendamping, aparat berwenang maupun petugas bank penyalur bantuan di lingkungan penerima PKH sehingga dana bantuan sosial justru diterima oleh oknum, bukan tiba di tangan penerima manfaat (Robot dan Toreh, 2020).

Penyebab ini kurang lebih sama dalam hal masalah implementasi bantuan sosial. Penelitian Purnia dkk (2019) bahkan menemukan bahwa ragam penyimpangan terjadi di level Pemerintah Daerah melalui berbagai metode, salah satunya dengan cara pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif sampai dengan penghubungan dengan kampanye pemilihan Kepala Daerah, dimana moralitas lebih tergerus lagi oleh tindakan negatif implementor dan calon-calon implementor yang seharusnya berpihak pada masyarakat. Termasuk adanya manipulasi data penerima manfaat oleh pemangku kepentingan yang memprioritaskan pada warga yang memilihnya saat Pemilu (Novita, 2020). Kemudian pada level Pemerintah Pusat penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 terjadi pada pejabat negara (CNN Indonesia, 2020).

Temuan-temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat rentan secara umum masih belum

mampu mencapai tujuan secara optimal. Apalagi bagi perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda. Bantuan sosial yang tadinya merupakan wujud perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dari pemerintah bagi masyarakat, justru belum mampu mengatasi masalah ekonomi dan sosial masyarakat di masa pandemi.

C. KESIMPULAN

Beban ganda dan jam kerja yang panjang telah sejak lama berada di pundak perempuan atas tanggungjawabnya pada urusan domestik, terlebih bagi perempuan pekerja yang juga memiliki tanggungjawab pada ruang publik atas pekerjaan berbayarnya. Beban itu semakin berat manakala pandemi Covid-19 datang mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Kebiasaan-kebiasaan baru sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi menjadikan perempuan sebagai kelompok yang mengalami dampak besar, terutama perempuan di kalangan keluarga miskin.

Pada masa pandemi Covid-19, perempuan terkena dampak secara tidak proporsional dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, dibutuhkan dukungan lingkungan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mendukung upaya penanganan Covid-19 yang memenuhi kebutuhan perempuan secara efektif sebab perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan hak dasar warga negara melalui implementasi berbagai kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat rentan dampak Covid-19, namun implementasinya menunjukkan langkah ini banyak menemui hambatan sehingga pencapaian tujuannya terkendala.

Penanganan pandemi Covid-19 secara nasional juga perlu dilakukan sebagai sebuah bentuk mitigasi bencana non-alam memerlukan pendekatan berkeadilan gender yang mencakup kelembagaan, tata kelola hingga operasionalisasinya. Sinergitas

antara pemerintah dengan pihak swasta, lembaga masyarakat, media massa dan perguruan tinggi turut dibutuhkan untuk menghadirkan kebijakan maupun layanan yang baik bagi perempuan dalam mewujudkan tercapaian tujuan SDGs khususnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Skema Pemberian Bantuan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19*. Dalam <https://bnpb.go.id/berita/skema-pemberian-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-terdampak-pandemi-covid19>.
- BBC News Indonesia. (2020). *Pandemi Covid-19 Menambah Beban Bagi Perempuan dan 'Bisa Menghapus Perjuangan 25 Tahun dalam Menciptakan Kesetaraan Gender'*. Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55072850>.
- BPS. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019*. Dalam <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/c%0A21630ee39b9004459680923/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2019.html>.
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020*. Dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>.
- CNN Indonesia. (2020). *Enam Masalah Penyaluran Bansos Selama Pandemi Corona*. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008201256-532-556227/6-masalah-penyaluran-bansos-selama-pandemi-corona>.
- ILO. (2015). *World Employment Social Outlook, Trends 2015*. Geneva: International Labour Organization. Dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_337069.pdf.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Profil Perempuan Indonesia 2019*. Dalam https://www.kemempna.go.id/lib/uploads/isi/b4bdc-profil-perempuan-indonesial-_2019.pdf.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Survei 'Menilai Dampak Covid-19' Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-laki*. Dalam <https://www.kemempna.go.id/index.php/page/read/29/2921/survei-menilai-dampak-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat-dibandingkan-laki-laki>.
- Kementerian Sosial. (2017). *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Komnas Perempuan. (2008). *Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lockley, Anne, Julia Tobias dan Adama Bah. (2013). *Hasil Kajian Gender dari Basis Data Terpadu*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) dan Australia Aid. Dalam [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Hasil%20Kajian%20Gender%20\(final\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Hasil%20Kajian%20Gender%20(final).pdf).
- Misiyah. (2021). "Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19". *Jurnal Perempuan No.107, November*, hal. 97-117. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Mufidah, A. (2020). "Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19". *Buletin Hukum dan Keadilan, Volume No.1*, hal. 159-166.
- Negara, T.A.S. dan Nuswardani. (2014). "Analisis Perilaku Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial ke Masyarakat". *Demokrasi dan Civil Society*, 168.
- Noerkaisar, S. (2019). *Sosial Perempuan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. hal. 83-100.
- Novika, S. (2020). *Dari Tekr*. detik.com
- Rumia, S.D., (2020). "Pengembangan Berbasis Media Computer and".
- Ramesh, M. dan (2019). *Sosial Asia: Social St. Martin*.
- Rahot, Y dan (2020). *Masalah". com/opini/*
- Saiful Munjani (2020). *Efektivitas Implementasi*
- Santoso, S., M (2020). *Sosial untuk Weighting No.1*, hal.21
- Sigiro, Atnike (2020). *Keluarga dan sebagai Pen hal 7-17. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK)*

Masyarakat oleh Pemerintah". *Rechtidee*, Vol.9 No.2, hal. 154-168.

Noerkaisar, Noni. (2020). "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol.2 No.1, hal. 83-104. Dalam <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363>.

Novika, S. (2021). "Segudang Masalah Macet BLT Dana Desa: Dari Teknis Hingga Politik". *Kompas*. Dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5033554>.

Purnia, S.D., S. Rahmatullah dan Ahmad Rifai. (2019). "Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile pada Dinas Sosial". *Indonesian Journal on Computer and Information Technology*, Vol.4 No.2.

Ramesh, M. dan Asher M. (2000). *Welfare Capitalism in Southeast Asia: Social Security, Health and Education Policies*. New York: St. Martin's Press.

Rohot, Y dan R. Toreh. (2020). "PKH, PHK dan Setumpuk Masalah". *Manado Post*. Dalam <https://manadopost.jawapos.com/opini/14/05/2020/pkh-phk-dan-setumpuk-masalah>.

Saiful Munjani Research & Consulting. (2020). *Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial*. Jakarta: SMRC.

Santoso, S., M. Informatika dan A.R. Kisaran. (2019). Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin dengan Metoda Simple Additive Weighting (SAW). *Journal of Science and Social Research*, Vol.II No.1, hal.21-28.

Sigro, Atnike Nova. (2012). "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga "Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama". *Jurnal Perempuan* No.73, April, hal 7-17. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Hingkasan Kebijakan Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan*

- Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam <https://www.tnp2k.go.id/download/1409>.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (2012). "Kegiatan-kegiatan Produktif Perempuan Ada Dimana?" *Jurnal Perempuan No.73, April*, hal 97-107. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- UNFPA. (2014). *Annual Report UNFPA 2014*. Geneva: United Nations Fund for Population Activities. Dalam https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_annual_report_2014_en.pdf.
- UN Women Indonesia. (2020). *Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Dalam https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting%20the%20Costs%20of%20COVID-19_Bahasa.pdf.
- Zulminarni, Nani. (2012). "Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat". *Jurnal Perempuan No.78, April*, hal. 51-59. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

LC
IDEN
F

Program

Program

ABSTRAK

Liberali
begitu bany
demokratis
tak istimewa
sebagai 'Nil
di sisi lain
dan gelomb
menerapkan
masyarakat:
sasaran meng
gerakan me
tidak dipilih.

Buku *Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* ini mewadahi empat bab pembahasan. Pada bab pertama diberikan judul *Governance, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19* memuat sembilan artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respons atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.

Pada bab kedua disematkan judul *Politik Elektoral di Masa Pandemi Covid-19* memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi pemilihan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemik khususnya di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga menghadirkan lima buah tulisan dikerangkai dalam judul bab *Demokrasi dan Gender di Masa Pandemi Covid-19*. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang *cyber politics*, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal.

Terakhir adalah Bab 4 terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.